

Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina

Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, Muhammad Ashry Sallatu

*Universitas Hasanuddin, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245, Indonesia*

ABSTRACT

The crisis of Ukraine is one of the hot topics in the international world talks. The cancellation of the signing of the Association Agreement, which is a stage of integration of Ukraine into the EU, resulted in a wave of massive protests from citizens of Ukraine. Representatives of the EU mediating between the Ukrainian government and the protesting parties ultimately resulted in an agreement to oust President Viktor Yanukovich. The deposition of President Viktor Yanukovich, called pro-Russian, resulted in anger on the part of Russia, on the grounds that the elected president of Viktor Yanukovich's successor was a pro-European party. After the election, unarmed armed forces took over the Crimea territory and held a referendum for the territory to join Russia. Russian involvement in this conflict led to the EU sanctioning Russia. This prolonged sanction not only affects Russia, but also against Europe, because basically each side is one of the largest trading partners.

Keywords : *Ukraine Crisis, Crimea, Russian Sanction, European Union*

ABSTRAKSI

Krisis Ukraina merupakan salah satu topik hangat dalam perbincangan dunia internasional. Pembatalan penandatanganan *Association Agreement*, yaitu sebuah tahapan integrasi Ukraina kedalam Uni Eropa, mengakibatkan gelombang protes besar-besaran dari warga Ukraina. Perwakilan Uni Eropa yang menjadi penengah antara pemerintah Ukraina dan para pihak yang melakukan protes, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk melengserkan presiden Viktor Yanukovich. Dilengserkannya Presiden Viktor Yanukovich yang disebut sebagai pro-Rusia, mengakibatkan kemarahan dari pihak Rusia, dengan alasan presiden terpilih pengganti Viktor Yanukovich merupakan pihak yang pro-Eropa. Setelah pemilihan, pasukan bersenjata tanpa identitas mengambil alih wilayah Krimea dan mengadakan referendum agar wilayah tersebut bergabung dengan Rusia. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini menyebabkan Uni Eropa memberi sanksi terhadap Rusia. Sanksi berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada Rusia, namun juga terhadap Eropa, karena pada dasarnya masing-masing pihak merupakan salah satu mitra dagang paling besar.

Kata kunci : krisis ukraina, krimea, sanksi rusia, Uni Eropa

1. PENDAHULUAN

Krisis Ukraina merupakan salah satu topik hangat dalam perbincangan dunia internasional. Konflik terkait Krimea, wilayah otonomi khusus di semenanjung selatan yang berkehendak untuk memerdekakan diri dan memilih bergabung kedalam federasi Rusia. Sebuah krisis yang bermula dari rentetan aksi protes masa terhadap pemerintahan di daerah barat Ukraina, menjadi aksi referendum di bagian lain yaitu Krimea. Seolah mengungkit sejarah lama, Ukraina memang pernah tergabung dalam federasi Uni Soviet hingga akhirnya tahun 1991 memilih untuk memisahkan diri.

Hubungan ekonomi Rusia dan Ukraina terjalin sangat erat sejak kemerdekaannya pada tahun 1991 pada masa terpecahnya Uni Soviet, hubungan yang lebih bersifat ketergantungan terhadap Rusia, dibutuhkan dalam masa transisi menjadi negara yang mandiri. Ukraina merupakan salah satu negara pendiri *Commonwealth of Independent States (CIS)*, yaitu organisasi regional persemakmuran negara-negara bekas Uni Soviet yang dibentuk pada awal runtuhnya Uni Soviet, yang menandakan bahwa Ukraina memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rusia pada awal pembentukannya.

Pergeseran peta geopolitik dimana *European Union* menjadi saingan terberat Rusia dalam pengaruhnya terhadap Eropa timur membawa Ukraina dalam integrasi yang lebih cenderung ke Eropa. *The European Union's Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* dengan Ukraina pada tahun 1994 menjadi awal mendekatnya Ukraina kedalam Uni Eropa. Perjanjian ini fokus terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial, pemerintahan, kebebasan pers dan hak-hak sipil. Perjanjian tersebut berlaku pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Setelah bertemu pada *EU-Ukraine Summit* pada 1997, dan *EU-Ukraine Summit* pada 1998, hubungan kedua belah pihak resmi berada pada kerangka *European Neighborhood Policy (ENP)* (EUROPA, 2016).

Tahun 2009 sampai tahun 2011 adalah tahun dimana terjadi proses negosiasi antara Uni Eropa dan Ukraina dalam menyepakati *Association Agreement (AA)*. *Association Agreement (AA)* adalah perjanjian penting sebagai langkah awal menjadi anggota Uni Eropa dan juga berlakunya *Free Trade Area (FTA)* terhadap Ukraina dan negara-negara anggota Uni Eropa. Pada Desember 2011, Uni Eropa dan Ukraina sepakat untuk mengadakan pertemuan terkait penandatanganan *Association Agreement* tersebut namun harus ditunda melihat situasi internal Ukraina pada saat itu tidak stabil, terkait dengan Yulia Tymoshenko (mantan Perdana Menteri Ukraina) yang dipenjarakan di Ukraina. Uni Eropa menunda sampai Pemilihan Umum Parlemen, yakni sebagai uji demokrasi dan *rule of law* di Ukraina. November 2013 adalah agenda selanjutnya dimana *Association Agreement* akan ditandatangani oleh Ukraina. Namun terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan bagi rakyat Ukraina serta Uni Eropa. Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich menghadiri pertemuan yang diagendakan di Lithuania, dan menolak menandatangani *Association Agreement* (Deutsche Welle, 2016).

Langkah pembatalan perjanjian ini kemudian memicu kemarahan kelompok oposisi yang pro-Eropa, yang kemudian melakukan demonstrasi. Sejak saat itu, protes datang bertubi-tubi terhadap Presiden Viktor Yanukovich. Pada 30 November 2013, kelompok oposisi pro-Eropa melakukan gelombang protes besar-besaran. Tindakan brutal yang dilakukan polisi dalam menghadapi para demonstran semakin meningkatkan dukungan publik untuk melakukan demonstrasi. Puncaknya pada bulan Desember, sebanyak 300.000 orang melakukan demonstrasi dan berhasil merebut balai kota Kiev³. Beberapa gedung pemerintahan diambil alih oleh para demonstran seperti Gedung Kehakiman di Kiev dan melakukan penghancuran terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di gedung tersebut.

Viktor Yanukovich beralasan bahwa tindakan para demonstran sudah menyerupai tindakan kudeta sehingga diperlukan tindakan lebih untuk menjaga stabilitas negara. Dengan alasan tersebut, parlemen Ukraina kemudian mengeluarkan undang-undang baru, yakni undang-undang anti-protes. Pengesahan undang-undang baru ini dianggap sebagai pelanggaran atas hak warga negara dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil tindakan persuasif kepada warga negara yang melakukan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara, sehingga intensitas demonstrasi pun menjadi semakin besar untuk menuntut undang-undang ini dihapuskan.

Gelombang protes yang sangat besar menyebabkan Perdana Menteri Ukraina mengundurkan diri dan parlemen mencabut undang-undang anti-protes baru tersebut. Pada Februari 2014 para pemimpin oposisi meminta mediasi internasional dan bantuan finansial dari Barat di hadapan lebih dari 60.000 demonstran di Kiev, dan pada tanggal 5-6 Februari 2014 Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton dan utusan khusus AS untuk Eropa, Victoria Nuland, mengunjungi Kiev (BBC, 2016).

Kunjungan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton dan utusan khusus AS untuk Eropa, Victoria Nuland ini, membuahkan hasil penandatanganan pakta perdamaian antara pemimpin oposisi dan Presiden Yanukovich. Pada 22 Februari 2014 parlemen Ukraina mengadakan pungutan suara untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Yanukovich dan pada tanggal 26 Februari 2014 parlemen Ukraina menunjuk pemerintah baru.

Pemerintahan baru hasil penunjukan parlemen Ukraina dianggap pro- Eropa oleh Rusia sehingga menyebabkan kemarahan besar dari Rusia. Pada hari yang sama sejumlah pasukan bersenjata pro-Rusia tanpa identitas secara perlahan mulai mengambil kendali di Krimea. Beberapa pasukan tak dikenal menduduki gedung parlemen regional dan Gedung dewan kementerian Krimea di Simferopol.

Pada tanggal 28 Februari 2014, sementara orang-orang bersenjata menduduki gedung, parlemen mengadakan sidang darurat, dan melakukan pungutan suara untuk mengakhiri pemerintah Krimea, dan mengganti Perdana Menteri Anatolii Mohylov dengan Sergey Aksyonov. Aksyonov adalah anggota Partai Persatuan Rusia, yang menerima 4% suara dalam pemilu terakhir.

Para petinggi pemerintahan Rusia di bawah kepemimpinan Putin nampaknya memang cukup beralasan memandang tumbanganya Yanukovich sebagai sebuah konspirasi. Yanukovich sendiri, sebelum pada akhirnya memutuskan meninggalkan negerinya akibat adanya ancaman yang dihadapinya, telah mengecam dibebaskannya pemimpin oposisi dan mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko setelah ditahan selama 2,5 tahun karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan dibebaskannya Tymoshenko yang selama ini dipandang tokoh oposisi yang pro Amerika dan negara-negara Uni Eropa pada 22 Februari 2014, harus dibaca sebagai prakondisi untuk memperkuat legitimasi moral gerakan partai-partai oposisi untuk menumbangkan Yanukovich melalui “kudeta konstitusional”.

Pada 1 Maret 2014, Putin memenangkan persetujuan parlemen untuk menginvasi Ukraina. Tanggal 6 Maret 2014 parlemen Krimea melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia, dan menjadwalkan referendum tentang hal itu. Pada 16 Maret 2014, referendum diselenggarakan di Krimea, dan menunjukkan dukungan yang luar biasa untuk bergabung dengan Federasi Rusia, meskipun diboikot oleh Tatar Krimea dan penentang referendum lainnya.

Tanggal 21 Maret 2014, Putin menandatangani undang-undang untuk melengkapi aneksasi Krimea. Keputusan Majelis Federasi Rusia untuk mengerahkan angkatan bersenjata di Semenanjung Krimea yang masuk kedaulatan Ukraina, memang tidak bisa dipandang semata-mata sebagai tindakan agresi militer sepihak karena sebelumnya telah didahului dengan campur-tangan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam urusan dalam negeri Ukraina dengan mendukung kelompok oposisi yang menentang kepemimpinan Presiden Yanukovich, yang cukup dengan dekat dengan Rusia. Pemberlakuan undang-undang aneksasi krimea tersebut

menyebabkan AS memberlakukan sanksi terhadap Putin, dan sekutu dekat AS yakni Uni Eropa mengikut dengan langkah-langkah yang sama. Sanksi ini kemudian menyebabkan terhentinya banyak aktifitas ekonomi antara Rusia dan AS serta Rusia dan Uni Eropa. Dari masalah sanksi ini, maka penulis mengangkat judul "*Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina*".

2. KERANGKA ANALISIS

Dalam memahami masalah serta menjawab pertanyaan penelitian di atas, diperlukan adanya sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini mencakup teori serta konsep yang menjadi landasan dan panduan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan prosedur ilmiah. Penelitian ini menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*), Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*), serta Konsep Geopolitik.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional". Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano, 1982). Sedangkan menurut Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara yaitu mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain (Mas'ood, 1990).

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara (Rosenau, 1976). Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Rosenau, 1980) Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu (Plano, 1999).

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut.

Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara di sekitarnya atau

negara tetangga merupakan pengaruh yang paling besar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh yang dirasakan oleh Rusia akibat sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa terkait aneksasi Krimea oleh Rusia. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder, yang bersumber dari pengumpulan data lapangan yang penulis lakukan selama penelitian, yaitu dari berbagai sumber tertulis. Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang sebelumnya dijabarkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Uni Eropa dan Rusia Serta Bentuk Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia

Hubungan Uni Eropa dan Rusia menjadi renggang akibat krisis Ukraina. Sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia, akibat aneksasi Krimea oleh Rusia, menjadikan hubungan kedua negara berada pada titik terendahnya pasca perang dingin. Melihat ke masa lalu, sejarah hubungan kedua pihak mulai menguat saat kedua pihak menandatangani *The Agreement on Trade and Commercial and Economic Cooperation between the USSR and the European Communities*. Kesepakatan ini ditandatangani pada 18 Desember 1989, saat itu Rusia masih dalam bentuk Uni Soviet. Kerjasama ini menjadi jembatan awal kerjasama Eropa dan Rusia di bidang ekonomi.

The Partnership and Cooperation Agreement (PCA) adalah sebuah langkah penting selanjutnya yang diambil oleh Eropa dan Rusia. Dokumen ini yang ditandatangani pada 24 Juni 1994, 4,5 tahun setelah penandatanganan kerjasama ekonomi pada 1989, memungkinkan kedua pihak untuk mengembangkan hubungannya dalam ranah politik, ekonomi, dan perdagangan (europa.eu 2017). Kemitraan antara Rusia dan UE juga merambah pada bidang-bidang politik keamanan yang bertujuan memberikan kontribusi pada keamanan dan perdamaian global. Namun, berbagai dialog di antara kedua aktor ini dalam bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan baru hanya mencapai tingkat konsultasi. Hal ini terutama karena masih tajamnya perbedaan kepentingan antara Rusia dan UE. Rusia, misalnya, tetap menginginkan keterlibatannya dalam berbagai forum yang membahas perkembangan kebijakan pertahanan UE, khususnya yang membahas lingkungan keamanan di negara-negara bekas satelitnya dan negara pecahan Uni Soviet, seperti Polandia, Bulgaria, Moldova, dan Ukraina. Sementara itu, UE pun menolak keterlibatan penuh Rusia dalam berbagai kebijakan pertahanan UE, khususnya mengabaikan usulan Rusia untuk membentuk EU-Russia Council. Usulan Rusia mengenai pembentukan dewan ini mengadopsi *Permanent NATO-Russia Council* yang sudah terbentuk sebelumnya antara NATO dan Rusia (Sputnik International, 2017). Kendatipun memang telah banyak terbentuk beragam dialog politik keamanan antara Rusia dan UE, dari sisi substansi, kemitraan antara Rusia dan UE dalam bidang politik keamanan masih sangat lemah. Salah satu faktor utama masih lemahnya kerja sama dalam bidang politik keamanan ini adalah masih tajamnya ketidaksepakatan antara di kedua aktor mengenai bentuk dan cakupan kerja sama yang ingin dibentuk.

Pada tahun 2003, UE membuat sebuah *European Neighbourhood Policy*, sebuah kerangka yang dibentuk oleh UE untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara di sebelah selatan dan utara UE. Rusia memilih untuk tidak berpartisipasi dengan kemitraan ini, dikarenakan Rusia melihat bahwa UE mensejajarkan Rusia dengan negara anggota-anggotanya, padahal semangat Rusia yaitu menginginkan kesetaraan dengan UE bahkan menjadi pesaing dari UE itu sendiri (tandfonline.com, 2017). Akibat dari ketidakikutsertaan Rusia tersebut, UE dan Rusia kemudian membuat *Four Common Spaces* pada pertemuan di St. Petersburg Mei 2003. Implementasi dan adaptasi dari kerempat poin tersebut dikenal dengan nama *Road Maps*. Keempat *Common Spaces* tersebut adalah *Common Economic Space*; *Common Space of Freedom, Security and Justice*; *Common Spaces On External Security*; *Common Space on Research, Education, Culture* (Emerson, 2017).

Common Economic Space tujuannya adalah menciptakan pasar terbuka dan terpadu antara UE dan Rusia. Ruang ini dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan dan investasi dan mempromosikan reformasi dan daya saing, berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan tata pemerintahan yang baik. Di antara berbagai macam tindakan yang diramalkan, sejumlah dialog baru akan diluncurkan. Kerjasama akan ditingkatkan berdasarkan kebijakan peraturan, masalah investasi, persaingan, layanan keuangan, telekomunikasi, transportasi, energi, aktivitas ruang angkasa dan peluncuran ruang angkasa, dan sebagainya. Isu lingkungan termasuk keselamatan nuklir dan pelaksanaan Protokol Kyoto juga menonjol.

Common Space of Freedom membuat sebuah langkah besar dengan berakhirnya perundingan mengenai fasilitas bebas visa antara UE dan Rusia. Kerjasama dalam memerangi terorisme dan bentuk-bentuk kegiatan ilegal internasional lainnya seperti pencucian uang, perang melawan narkoba dan perdagangan manusia akan berlanjut serta keamanan dokumen melalui pengenalan fitur biometrik dalam berbagai dokumen identitas. Dukungan Uni Eropa terhadap pengelolaan perbatasan dan reformasi sistem peradilan Rusia termasuk di antara hal-hal penting dari ruang ini.

Dalam *Common Space on External Security*, menggarisbawahi tanggung jawab bersama para pihak untuk sebuah tatanan internasional berdasarkan multilateralisme yang efektif, dukungan mereka untuk peran sentral PBB, dan untuk efektivitas khususnya *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)* dan Dewan Eropa. Para pihak akan memperkuat kerja sama mereka dalam pengelolaan keamanan dan krisis untuk mengatasi tantangan global dan regional dan ancaman utama, terutama terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Mereka akan memberi perhatian khusus untuk mengamankan stabilitas di daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan Rusia dan UE ("konflik beku" di Transnistria, Abkhazia, Ossetia Selatan, Nagorno-Karabakh). Kegiatan UE di bidang ini dilakukan dalam kerangka *Common Foreign and Security Policy*.

Common Space on Research, Education, Culture. Ruang ini dibangun berdasarkan hubungan jangka panjang dengan Rusia melalui keikutsertaannya dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan UE dan FPRD ke 6 khususnya, dan di bawah program *TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies)*. Ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan komunitas riset Uni Eropa dan Rusia dan warisan budaya dan intelektual dengan memperkuat hubungan antara penelitian dan inovasi dan kerjasama yang lebih erat mengenai pendidikan seperti melalui konvergensi kurikulum universitas dan kualifikasi. Ini juga menjadi dasar kerja sama di bidang budaya. Sebuah Institut Studi Eropa yang didanai bersama oleh

kedua belah pihak akan didirikan di Moskow untuk memulai tahun ajaran 2006/7. Rusia dan Uni Eropa terus bekerja sama di bawah kerangka Horizon 2020, yang berlangsung dari tahun 2014 sampai 2020.

Secara garis besar, implementasi dari kerjasama *Four Common Spaces* antara Rusia dan Uni Eropa meliputi beberapa area yang penting :

Kerjasama Perdagangan

Rusia menempati peringkat ketiga sebagai mitra dagang ketiga Uni Eropa (mewakili 8,4% dari total perdagangan) dan UE adalah mitra dagang terbesar Rusia (dengan sebanyak 48% dari total perdagangan asing di Rusia) dan investor asing yang paling penting (sampai 75% dari investasi langsung asing berasal dari UE). Ekspor UE utama ke Rusia adalah mesin, peralatan transportasi (mobil), bahan kimia, obat-obatan, barang elektronik dan produk pertanian (total nilai sebesar €103 miliar pada tahun 2014). Ekspor Rusia ke UE didominasi dengan bahan bakar mineral (74,9%) (ueropa.eu 2017).

Perdagangan antara dua ekonomi besar ini tumbuh dengan mantap sampai pada pertengahan 2008, ekspor UE ke Rusia mengalami penurunan terutama karena adanya krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara di dunia, yang memiliki dampak negatif pada volume perdagangan. Pertumbuhan kembali pulih berangsur di tahun 2010 dan mencapai tingkat rekor pada tahun 2012.

Kerjasama Energi dan Keamanan

Kerjasama di sektor energi termasuk prioritas utama hubungan Rusia-Uni Eropa. Rusia adalah eksportir gas terbesar di dunia dan bersaing dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai penghasil dan pengeksportir minyak terbesar (Russia Today, 2017). Uni Eropa adalah konsumen utama sumber energi Rusia. UE dan Rusia bersama mempertahankan minat untuk meningkatkan kerjasama energi yang saling menguntungkan yang akan berkontribusi dalam memperkuat keamanan energi kedua belah pihak, menetapkan peraturan yang adil untuk memfungsikan pasar energi dan prediktabilitas pasar yang lebih besar. Komponen terpenting dari kerja sama Rusia-UE di bidang ini adalah menciptakan kondisi pasokan energi tak terputus ke pasar UE. Untuk tujuan ini, sebuah Memorandum tentang Mekanisme Peringatan Dini ditandatangani pada tahun 2009 di KTT Rusia-Uni Eropa di Stockholm yang menetapkan modalitas kerja bersama mengenai pencegahan krisis dan manajemen krisis di bidang pasokan energi dengan partisipasi negara- negara transit.

Rusia memasok sejumlah besar bahan bakar fosil dan merupakan pengeksportir minyak dan gas alam terbesar ke Uni Eropa. Pada tahun 2007, Uni Eropa mengimpor dari Rusia 185 juta ton minyak mentah, yang menyumbang 32,6% dari total impor minyak, dan 100,7 juta ton ekuivalen minyak setara gas, yang menyumbang 38,7% dari total impor gas. Perusahaan Gazprom Rusia adalah pengeksportir gas alam ke Eropa. Perusahaan ini juga mengendalikan sejumlah besar anak perusahaan, termasuk berbagai aset infrastruktur yang berada di Eropa. Perusahaan ini telah menjalin penjualan anak perusahaan di banyak pasar ekspornya, dan juga telah berinvestasi dalam akses ke sektor industri dan pembangkit tenaga listrik di Eropa Barat dan Tengah. Selain itu, Gazprom telah mendirikan usaha patungan untuk membangun jaringan pipa gas alam dan depot penyimpanan di sejumlah negara Eropa (Koszalin, 2008).

Importir gas Rusia terbesar di Uni Eropa adalah Jerman dan Italia, terhitung hampir setengah dari impor gas UE dari Rusia. Importir gas Rusia lainnya yang lebih besar (lebih dari 5 miliar meter kubik per tahun) di Uni Eropa adalah Prancis, Hungaria, Republik Ceko, Polandia,

Austria dan Slovakia. Pada 2009, gas alam Rusia dikirim ke Eropa melalui 12 jaringan pipa, dimana tiga diantaranya adalah pipa saluran langsung (ke Finlandia, Estonia dan Latvia), empat melalui Belarus (ke Lituania dan Polandia) dan lima melalui Ukraina (ke Slowakia, Romania, Hungaria Dan Polandia). Persediaan sumber energi yang stabil yang memenuhi tingkat permintaan hanya dapat dijamin dengan infrastruktur transportasi yang sesuai. Untuk mengembangkan infrastruktur semacam itu, baik Rusia maupun Uni Eropa bermaksud membangun sejumlah jaringan pipa baru, termasuk jaringan pipa gas, untuk memenuhi permintaan masa depan dan memastikan keamanan energi yang lebih baik di Eropa. Pada tahun 2011, sebuah pipa tambahan, Nord Stream (langsung ke Jerman melalui Laut Baltik), dibuka (Beatz, 2017). Transneft sebuah perusahaan milik negara Rusia yang bertanggung jawab atas jaringan pipa minyak nasional, adalah perusahaan Rusia lain yang memasok energi ke Eropa.

Kemakmuran dan keamanan Uni Eropa memang sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil dan melimpah. Fakta bahwa warga negara di sebagian besar negara anggota UE tidak pernah mengalami gangguan yang berarti terhadap pasokan energinya sejak krisis minyak tahun 1970an adalah sebuah bukti keberhasilan negara-negara anggota dan UE dalam menjamin ketersediaan pasokan energi. Bagi kebanyakan warga negara, energi sifatnya harus selalu tersedia, di mana-mana dan tidak terganggu, hal ini memiliki pengaruh besar pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasional mengenai kebijakan energi, yang lebih dipentingkan daripada hal lain. Namun pada musim dingin tahun 2006 dan 2009, gangguan sementara pasokan gas melanda warga UE di beberapa negara anggota timur. Sejak saat itu, banyak yang telah dilakukan untuk memperkuat keamanan energi Uni Eropa dalam hal pasokan gas dan untuk mengurangi jumlah negara anggotanya yang secara eksklusif bergantung pada satu pemasok tunggal, yaitu Rusia. Namun, terlepas dari semua pencapaian dalam memperkuat infrastruktur dan diversifikasi pemasoknya, Uni Eropa tetap rentan terhadap kejutan energi eksternal.

Dialog Sektor

Dialog Sektor telah memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan proyek *Russia-EU Common Economic Space*. Tujuan dan bidang utama kegiatan dialog ini membahas tentang *Road-Map Russia-EU Common Economic Space* oleh KTT Rusia-Uni Eropa di Moskow pada bulan Mei 2005. Rusia dan Uni Eropa telah membentuk 13 dialog (selain dialog tentang isu "horizontal" yang mencakup investasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual). Hal tersebut berbeda, baik dalam hal konten praktis dan intensitas interaksi antara badan kerja masing-masing pihak. Kerjasama ilmiah dan teknologi Rusia-UE berdiri sendiri, dibentuk berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Rusia dan Komunitas Eropa tentang Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada 16 November 2000.

Dialog tentang energi

Keputusan untuk mengadakan dialog energi diambil pada KTT Rusia-Uni Eropa di Paris pada tanggal 30 Oktober 2000. Dialog tersebut seharusnya berfokus pada isu-isu utama yaitu: memastikan pasokan sumber energi yang tidak terputus dari Rusia ke pasar Uni Eropa, kerja sama di bidang Energi pada dasar yang sama, saling menguntungkan dan tidak diskriminatif. Pada tahun 2013 Rusia dan Uni Eropa menandatangani Roadmap mengenai Kerjasama Energi Rusia-Uni Eropa sampai tahun 2050, menetapkan tujuan utama kerja sama dan cara-cara yang mungkin untuk mencapainya. Namun, kemudian hasil dari dialog energi tersebut dibekukan atas prakarsa Komisi Eropa (europa.eu 2017).

Dialog tentang transportasi

Kerangka Acuan yang mencakup prinsip, tujuan dan struktur Dialog Rusia-UE di bidang transportasi dan infrastruktur ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2005. Dialog tersebut mencakup bidang-bidang berikut: strategi transportasi, infrastruktur dan kemitraan publik-swasta, transportasi jalan dan kereta api, transportasi maritim, laut, dan darat, transportasi udara, serta keamanan dan keselamatan transportasi. Pertemuan puncak pada bidang penerbangan Rusia-Uni Eropa diadakan pada bulan Oktober 2011 di St.Petersburg (Julkaisut, 2017).

MoU yang berbicara mengenai Transportasi dan Logistik ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2009 di Naples. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proyek gabungan infrastruktur transportasi dan menghilangkan hambatan administratif dalam hubungan transportasi. Komisi Eropa, beberapa negara anggota UE, Norwegia dan Rusia merupakan pihak dalam Memorandum tersebut. Para pihak mengadakan pertemuan tingkat tinggi Kemitraan pada bulan Desember 2014 di Moskow.

Dialog tentang aturan produk industri

Dialog tentang aturan produk industri (standarisasi, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian) ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia serta Direktorat Jenderal Komisi Industri Eropa pada tanggal 7 Desember 2005 di Brussels. Tujuannya untuk untuk menyelaraskan peraturan dan standar teknis, serta pendekatan untuk saling mengakui hasil penilaian kesesuaian oleh kedua belah pihak, dan bertukar informasi mengenai undang-undang dan standar peraturan baru. *The Russian Federal Agency on Technical Regulation and Metrology (Rosstandart)* dan *the European Committee for Standardisation (CEN)* serta *the European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC)* menandatangani sebuah Perjanjian Kerjasama pada tanggal 17 September 2013 di St.Petersburg. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelaraskan lebih lanjut sistem yang dijalankan oleh masing-masing Rusia dan UE.

Dialog tentang kebijakan industri dan perusahaan

Dialog ini diluncurkan bersamaan dengan dialog sebelumnya dan dilaksanakan oleh badan yang sama. Para pihak saling bertukar informasi mengenai pengembangan industri dan perusahaan tertentu (industri otomotif, tekstil, kimia, dirgantara, pertambangan dan metalurgi, UKM) mengenai inovasi dan mendiskusikan cara meminimalkan hambatan non-tarif dalam perdagangan industri pengolahan dan mesin.

Dialog tentang komunitas informasi

Kerangka Acuan Dialog Rusia-UE mengenai komunitas informasi ditandatangani antara Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Massa dan Direktorat Jenderal Komunikasi Jaringan, Isi dan Teknologi dari Komisi Eropa di Brussels pada tanggal 7 Desember 2005. Dialog tersebut menyediakan kerangka kerja untuk membahas perkembangan masyarakat informasi, pasar telekomunikasi, peraturan perundangan di Rusia dan UE, serta proyek yang dilaksanakan oleh para pihak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Secara khusus dibahas mengenai masalah identifikasi elektronik, penurunan tarif roaming internasional, penggunaan spektrum radio dan tata kelola Internet yang terkoordinasi. Para pihak bekerja untuk mengidentifikasi bidang kerjasama yang prospektif, termasuk proyek penelitian ilmiah bersama, antara lain dalam kerangka program penelitian ilmiah publik.

Dialog kerjasama luar angkasa

Kerangka Acuan untuk Dialog Rusia-UE mengenai kerja sama antariksa diadakan pada tanggal

10 Maret 2006 di Brussels oleh Badan Antariksa Federal Rusia, Komisi Eropa dan Badan Antariksa Eropa. Proyek "Soyuz at Kourou" adalah salah satu yang dikembangkan dalam Dialog. Para pihak menyetujui langkah-langkah praktis dalam rentang 2014-2016 mengenai pelaksanaan proyek eksplorasi Mars bersama. Kerjasama program Cosmic Vision untuk mengeksplorasi Jupiter serta pembicaraan mengenai rancangan kesepakatan di bidang sistem satelit navigasi global (GNSS) ditekankan dalam dialog ini. Pertemuan ke 8 dari Dewan Pengurus Dialog diadakan di Brussels pada bulan Juni 2013 di mana para pihak saling bertukar pandangan mereka tentang beberapa area eksplorasi antariksa yang prospektif. Pada bulan Februari 2014, para pihak mengadakan konsultasi mengenai prospek kerja sama Rusia- UE di bidang peluncuran satelit kecil yang mudah dioperasikan; Pembiayaan proyek yang sesuai dalam rangka Program Riset dan Inovasi Horizon 2020 didiskusikan.

Dialog tentang agrikultur

MoU yang menetapkan Dialog tentang pertanian dan pembangunan pedesaan ditandatangani pada tanggal 11 April 2006 di Moskow oleh Kementerian Pertanian Rusia dan Direktorat Jenderal Komisi Eropa untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Memorandum tersebut menekankan kerjasama dalam tiga kelompok kerja: pengembangan pasar pangan, pembangunan pedesaan, kebijakan ilmiah dan teknologi serta inovasi pertanian. Kerja sama mengenai masalah kesehatan hewan dan phytosanitary, meski tidak dicakup oleh Dialog resmi, berkembang cukup aktif dan bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perundangan Rusia dan UE tentang keamanan produk pertanian. Sejak tahun 2004 dasar hukum untuk kerja sama telah dikembangkan dalam bentuk Memorandum mengenai isu-isu spesifik kerjasama antara otoritas pengawasan Rusia dan UE.

Dialog tentang lingkungan

Kerangka Acuan untuk Dialog tentang Lingkungan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2006 di Helsinki oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Federasi Rusia, dan Direktorat Jenderal Lingkungan Komisi Eropa. Dialog mencakup satu kelompok kerja dan tujuh sub kelompok. Bidang fokus utama adalah konvergensi kebijakan lingkungan, perubahan iklim, masalah air dan laut, keanekaragaman hayati dan perlindungan alam, perlindungan hutan, produksi bersih dan pencegahan polusi. Pada tahun 2013 sebuah pertemuan kelompok kerja, serta pertemuan sub-kelompok mengenai keanekaragaman hayati dan tentang perubahan iklim diadakan di Brussels. Pada 2014, para pihak bersiap mengadakan pertemuan PPC tentang lingkungan; Namun, pertemuan tersebut ditunda pada inisiatif Uni Eropa pada saat terakhir.

Dialog tentang kebijakan keuangan dan makroekonomi

Sebuah Memorandum yang menetapkan dialog ini ditandatangani di Brussels pada tanggal 2 Februari 2007. Sisi Rusia dalam Dialog tersebut diwakili oleh Menteri Keuangan, Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Bank of Russia; Pihak Uni Eropa - oleh Direktorat Jenderal Komisi Eropa yang terkait dengan urusan ekonomi dan keuangan, Bank Sentral Eropa, Otoritas Perbankan Eropa dan Otoritas Pasar dan Bursa Efek Eropa.

Area prioritas Dialog mencakup langkah-langkah untuk memperkuat sistem keuangan global dan sistem keuangan Rusia dan Uni Eropa yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan, transparansi dan stabilitas kedua pihak; perbaikan peraturan makroekonomi, strategi pembangunan berkelanjutan, serta penerapan standar pelaporan dan auditing keuangan internasional di Rusia dan Uni Eropa, keadaan industri asuransi di Rusia dan UE dan prospek pembangunan kedua pihak. Rapat pleno Dialog mengenai kebijakan keuangan dan makroekonomi diadakan setahun sekali secara bergantian di Moskow dan Brussels. Sejauh ini delapan rapat pleno Dialog telah diadakan, dimana yang terakhir berlangsung pada tanggal 19

November 2013 di Brussels. Beberapa pertemuan diadakan di tingkat menteri (dari sisi Uni Eropa - di tingkat Komisaris).

Dialog ini memiliki kelompok kerja sebagai berikut: pada aktivitas perbankan dan ekuitas (5 pertemuan yang diadakan), mengenai asuransi (6 rapat), mengenai akuntansi dan audit (8 pertemuan), mengenai strategi untuk mengatasi krisis dan pertumbuhan berkelanjutan (4 pertemuan). Pertemuan Kelompok Kerja mengenai strategi untuk mengatasi krisis dan pertumbuhan berkelanjutan secara tradisional mencakup konsultasi mengenai isu- isu dalam agenda G20.

Dialog tentang kebijakan regional

MoU yang menetapkan dialog mengenai kebijakan regional antara Kementerian Pembangunan Daerah Rusia dan Komisi Eropa ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2007. Topik utama Dialog adalah kerja sama antara Rusia dan UE di Wilayah Laut Baltik. Sebuah kelompok pakar telah dibentuk untuk meneliti kemungkinan interaksi antara Rusia-UE di wilayah tersebut, wilayah di mana Strategi Pembangunan Sosial-Ekonomi Rusia untuk Distrik Utara- Barat sampai periode 2020 dan strategi Uni Eropa untuk Wilayah Laut Baltik memiliki prioritas yang sama.

Rusia dan Uni Eropa bekerja sama dalam rangka lima program kerja sama lintas batas berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Federasi Rusia dan Komisi Eropa yang ditandatangani pada tahun 2009. Program tersebut merupakan format kerja sama utama antara wilayah perbatasan Rusia dan wilayah Estonia, Finlandia, Latvia, Lithuania, Polandia, Swedia, serta Norwegia. Total anggaran program untuk periode 2007-2013, yang dibentuk oleh kontribusi yang dibuat oleh Rusia dan Uni Eropa, berjumlah 437 juta euro. Program tersebut memungkinkan daerah-daerah di kedua sisi perbatasan bersama untuk mengembangkan kerjasama di bidang yang telah mereka pilih sebagai prioritas. Program tersebut berkontribusi terhadap pengembangan kontak antar daerah secara langsung, pembangunan sosio-ekonomi di wilayah perbatasan dan modernisasi infrastruktur perbatasan. Lebih dari 200 proyek telah dilaksanakan dalam kerangka kerja sama lintas batas.

Dialog tentang perikanan

Nota Kesepahaman antara Komite Negara Rusia tentang Perikanan dan Komisi Eropa menetapkan prinsip, tujuan dan struktur dari Dialog on Fisheries ditandatangani pada tanggal 24 April 2008. Pada bulan April 2009, Persetujuan Rusia-UE tentang Perikanan di Laut Baltik ditandatangani di Brussels. Menurut Perjanjian ini, *Joint Managing Committee* telah dibentuk. Badan kerja Dialog telah beroperasi sejak 2010. Kedua pihak telah mengadakan sejumlah pertemuan untuk mencegah masalah perikanan yang tidak sah, tidak dideklarasikan dan tidak diatur dalam pertukaran kuota antara organisasi perikanan Rusia dan UE, serta sejumlah isu lainnya.

Dialog tentang kesehatan

Kerangka Acuan untuk dialog kesehatan antara Kementerian Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Sosial Rusia dan Direktorat Jenderal Keselamatan Pangan dan Kesehatan dari Komisi Eropa ditandatangani di Moskow pada tanggal 28 Mei 2009. Kerjasama di bawah dialog ini mencakup berbagai isu, prioritasnya adalah penyakit menular dan tidak menular, resistensi antimikroba, ancaman lintas batas terhadap kesehatan penduduk, vaksinasi, peredaran dan pengendalian mutu produk farmasi, memerangi konsumsi tembakau dan alkohol.

Dialog tentang Perlindungan Hak Konsumen

Sebuah Nota Kesepahaman antara *the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare (Rosпотребнадзор)* dan Direktorat Jenderal

Kesehatan dan Konsumen Eropa ditandatangani di Moskow pada tanggal 22 Maret 2013. Nota tersebut mempertimbangkan untuk memperkuat saling pengertian mengenai kebijakan dan Undang-undang di bidang perlindungan konsumen, pertukaran informasi dan pengalaman di bidang standar perlindungan konsumen, serta konsultasi mengenai isu-isu topikal.

Masalah visa

Sejak pertengahan 1990-an perkembangan hubungan antara Federasi Rusia dan Negara-negara Anggota UE telah disertai dengan pertumbuhan yang mantap dalam jumlah kunjungan bersama warganya. Pembentukan *Schengen area* dengan kebijakan visa umum di dalam UE berkontribusi terhadap hal itu. Intensitas kunjungan timbal balik semakin meningkat seiring dengan peningkatan wilayah EU dan *Schengen area* ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang secara tradisional memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia. Akibatnya, masalah visa mengambil tempat penting dalam agenda Rusia-UE.

Rusia dan negara anggota UE terikat oleh komitmen yang dilakukan di dalam *Organisation for Security & Co-operation in Europe (OSCE)* untuk secara bertahap menyederhanakan dan mengelola prosedur keluar dan masuk secara fleksibel, dan mempertimbangkan kemungkinan penghapusan resistansi masuk secara timbal balik, Karena pergerakan dan kontak yang lebih bebas di antara warga negara adalah hal penting dalam konteks perlindungan dan promosi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pada tahap pertama, perhatian terutama diberikan pada liberalisasi sistem visa yang ada. Pada tahun 2006 para pihak menyimpulkan perjanjian tentang fasilitasi penerbitan visa. Perjanjian tersebut menghasilkan keputusan mengenai penerbitan visa yang disederhanakan untuk sejumlah kategori orang, terutama pengusaha; pelajar; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan dalam acara olahraga internasional; kerabat dekat orang yang tinggal secara legal di Rusia atau negara anggota UE.

Pada tahun 2011, Rusia dan Uni Eropa meluncurkan negosiasi untuk mengubah Perjanjian tersebut dengan tujuan memfasilitasi lebih lanjut masalah perjalanan lintas batas untuk warganya. Modernisasi perjanjian ini akan memperluas kategori orang-orang yang berhak mendapatkan visa multiple-entry dengan jangka waktu lima tahun untuk validitas dan memperluas daftar orang-orang yang dibebaskan dari biaya visa. Selain itu, juga memasukkan kategori tambahan warga negara yang berhak menikmati sistem bebas visa.

Masalah migrasi

Perkembangan hubungan antara Rusia dan negara-negara anggota UE, perubahan pada pasar tenaga kerja serta bidang sosial dan ekonomi memerlukan pengelolaan arus migrasi yang lebih lanjut. Itulah sebabnya migrasi merupakan bagian integral penting dari kerjasama Rusia- UE di dalam *Common Space of Freedom, Security and Justice*. Penandatanganan *Agreement on Readmission* pada tahun 2006 (tentang pengakuan orang-orang yang secara ilegal tinggal di wilayah suatu negara untuk kembali ke negara asal mereka) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2007, menjadi langkah penting dalam memerangi migrasi ilegal.

Pada bulan Mei 2011, Rusia dan Uni Eropa meluncurkan Dialog Migrasi tingkat tinggi. Dialog tersebut terdiri dari pertukaran pandangan secara reguler mengenai isu-isu topikal tentang migrasi legal, suaka dan bentuk-bentuk perlindungan internasional lainnya, serta memerangi migrasi ilegal dan perdagangan manusia.

Masalah perlawanan terhadap kejahatan transnasional dan terorisme

Perjanjian Kerjasama antara Federasi Rusia dan Kepolisian Eropa (Europol) yang ditandatangani di Roma pada tanggal 6 November 2003 memberikan kerangka hukum untuk kerjasama antara Rusia dan Uni Eropa dalam memerangi kejahatan transnasional dan

terorisme. Hal ini diadopsi sesuai dengan *Road Maps on the Common Spaces of External Security and of Freedom, Security and Justice*.

Kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional mencakup delapan jenis tindak pidana. Ini termasuk pertukaran pengalaman dan informasi praktis, tindakan legislatif dan pedoman metodologis, serta mengadakan lokakarya bersama, kunjungan studi dan konsultasi. Pakar Rusia memberikan informasi kepada Europol secara teratur tentang kejahatan terorganisir dan terorisme internasional yang digunakan oleh Europol dalam laporan tahunannya mengenai situasi di UE. Pakar Europol secara teratur mengikuti seminar dan konferensi yang diadakan di Rusia. Pada gilirannya, spesialis Rusia berpartisipasi secara reguler dalam pertemuan kelompok kerja, konferensi dan lokakarya yang relevan mengenai Europol yang terkait dengan pemberantasan terorisme dan kejahatan terorganisir, pemalsuan, kejahatan kekayaan intelektual, cybercrime, perdagangan gelap, serta perlindungan saksi.

Kerjasama Anti-narkoba

Rusia dan Uni Eropa menyadari bahaya kecanduan narkoba terhadap kesehatan masyarakat dan melakukan upaya serius dalam memerangi perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan pengedarannya. Memerangi produksi dan penyebaran zat psikoaktif baru dan obat-obatan narkotika sangat penting bagi kedua belah pihak.

Kerjasama Rusia-UE dalam perang melawan perdagangan obat terlarang didasarkan pada Nota Kesepahaman antara *Federal Drug Control Service* dari Federasi Rusia dan Pusat Pemantauan Obat dan Narkoba Eropa yang ditandatangani di Mafra (Portugal) pada tahun 2007, dan juga Perjanjian Rusia-UE tentang Prekursor Obat yang ditandatangani pada bulan Juni 2013 pada KTT Rusia-UE di Yekaterinburg.

Kerjasama Yudisial

Kerjasama yudisial antara Rusia dan UE dilakukan terutama dalam masalah pidana dan perdata serta komersial. Kerjasama yudisial atas masalah kriminal dilakukan melalui kontak bilateral antara Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia dan otoritas yang kompeten dari negara-negara Anggota UE. Rusia juga bekerja sama dengan *Eurojust*, badan khusus UE yang membantu pemerintah nasional dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan transnasional. Rusia dan *Eurojust* telah meluncurkan negosiasi mengenai draft kesepakatan kerja sama. Putaran terakhir perundingan berlangsung di Den Haag pada tanggal 27-28 Januari 2014.

Manajemen krisis

Kerjasama Rusia-UE di bidang militer merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan yang berkembang atas dasar *Road Map for the Common Space of External Security*. Untuk pertama kalinya isu dialog bilateral di bidang manajemen keamanan dan krisis diajukan saat KTT Rusia-Uni Eropa di Paris pada bulan Oktober 2000. Akibatnya, "Deklarasi Bersama mengenai penguatan dialog dan kerja sama mengenai masalah-masalah politik dan keamanan di Eropa" diadopsi. Deklarasi tersebut menggarisbawahi tujuan bersama berikut ini: Untuk melembagakan konsultasi mengenai masalah keamanan dan pertahanan pada tingkat yang sesuai dan dalam format yang sesuai; Untuk mengembangkan dialog strategis, terutama dalam hal masalah keamanan yang berimplikasi pada Federasi Rusia dan Uni Eropa; Untuk memperluas ruang lingkup konsultasi reguler di tingkat ahli mengenai isu pelucutan senjata, pengendalian senjata dan non-proliferasi; Untuk mempromosikan kerjasama di bidang manajemen krisis.

Sebagai langkah berikutnya, pada bulan Mei 2002, dalam sebuah *Joint Statement* di KTT Rusia-Uni Eropa di Moskow, pihak-pihak tersebut menekankan topik berikut untuk diskusi

reguler di masa depan: Pencegahan konflik; Deminning; Penggunaan kemampuan pengangkutan udara strategis Rusia oleh Uni Eropa;

Sejak itu, pertemuan antara Kepala Staf Umum (CGS) Angkatan Bersenjata Rusia dan Ketua Komite Militer Uni Eropa telah berlangsung secara reguler. Pada bulan Mei 2007, Jenderal Angkatan Darat CGS Rusia Baluevsky menyampaikan sebuah pidato kepada Komite Militer di tingkat Kepala Staf Umum (Pertahanan) negara anggota Uni Eropa. Pada bulan Juni 2007, Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Serdyukov, dalam kunjungannya ke Brussels mengadakan pembicaraan dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Mr. J.Solana, di mana niat kedua belah pihak untuk lebih mengembangkan kerja sama di bidang militer akhirnya disepakati.

Perlindungan Sipil

The Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM of Russia) adalah mitra utama struktur Uni Eropa yang bekerja di bidang perlindungan sipil, pencegahan dan tanggapan darurat, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Salah satu fungsi utama EMERCOM adalah kerjasama internasional di bidang manajemen darurat, perlindungan sipil, pencarian dan penyelamatan, memastikan keselamatan atas kebakaran, dan keselamatan orang-orang di objek air, melakukan operasi khusus bawah laut, serta memberikan dukungan kepada proyek kemanusiaan internasional.

Kerjasama dalam perlindungan sipil dilaksanakan sesuai dengan *Administrative Arrangement* (22 Maret 2013) antara EMERCOM dan *European Commission Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection (DG ECHO)* mengenai kerja sama praktis di bidang perlindungan sipil. Setiap tahun delegasi ahli dari EMERCOM dan DG ECHO bertukar kunjungan untuk belajar tentang kegiatan mitra dalam manajemen darurat.

Pada bulan Juni 2007, pemantau EMERCOM ambil bagian dalam latihan perlindungan sipil «EULUX-2007» di Luxemburg. Pada bulan April 2008, penerbangan pemadam kebakaran EMERCOM berpartisipasi dalam latihan khusus *EU FIRE 5* di Sardinia, Italia. Selama latihan itu, unit penerbangan pemadam kebakaran dari Portugal, Prancis, Yunani, Italia, Kroasia dan Rusia mempraktikkan kerja sama dalam memerangi kebakaran hutan. Sebagai hasil dari latihan tersebut, prototipe skuadron penerbangan internasional untuk memerangi kebakaran hutan didirikan. Atas permintaan dari pemerintah negara-negara Eropa atau dari *EU ERCC* berbagai personil dan sarana EMERCOM dapat dilibatkan untuk mendukung mekanisme perlindungan sipil UE dalam mencegah dan menangani bencana alam dan yang disebabkan manusia. Selama kebakaran hutan berskala besar di Eropa Selatan (musim panas 2007) EMERCOM Rusia memasang pesawat amfibi Beriev-200 ke Portugal, dua helikopter Mi-26 dan Mi-8 ke Yunani, serta sebuah pesawat IL-76 ke Bulgaria. Personel Rusia mendukung upaya Uni Eropa dalam operasi melawan kebakaran hutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penghapusan mereka.

Ahli EMERCOM bekerja sama dengan spesialis dari Departemen Perlindungan Sipil Italia di Aquila, Italia dalam menilai stabilitas bangunan dan konstruksi yang rusak akibat gempa dahsyat pada bulan April 2009. Pada musim panas 2010 beberapa anggota *EU Civil Protection Mechanism* yang berpartisipasi (Bulgaria, Estonia, Prancis, Jerman, Italia, Latvia, Lituania dan Polandia) memberikan personil dan sarana, termasuk aset udara pemadam kebakaran, untuk operasi internasional dalam memerangi kebakaran alam di bagian Eropa dari Rusia. Mereka mengirimkan barang-barang bantuan yang diperlukan, serta menerima petugas pemadam kebakaran EMERCOM untuk rehabilitasi pascabencana. Hal ini telah menunjukkan sekali lagi solidaritas dan kecenderungan untuk saling mengintegrasikan upaya Eropa dalam menangani keadaan darurat.

Pada bulan November 2010, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerjasama dengan UE di bidang ini, *EMERCOM* Rusia diundang untuk berpartisipasi dalam latihan lapangan skala penuh dari layanan darurat UE «*TEREX-2010*» yang diadakan di wilayah Tuscany, pusat Italia. Latihan itu bertujuan untuk melatih semua aspek respons internasional terhadap gempa dahsyat. Selain Italia sebagai negara tuan rumah, penyelamatan dan unit medis dari Austria, Kroasia, Prancis dan Slovenia turut berpartisipasi. Rusia diwakili oleh satuan tugas pesawat terbang multi tujuan yang mencakup tim pencari dan penyelamat perkotaan dengan unit K-9, rumah sakit lapangan dengan modul dukungan psikologis darurat, serta tim penilai struktural.

Penelitian, sains dan teknologi.

Kerjasama intensif riset dengan UE dianggap oleh Rusia untuk menjadi prioritas jangka panjang. Peningkatan potensi penelitian Rusia dan UE merupakan faktor penting untuk interaksi lebih lanjut dalam modernisasi dan kemajuan ekonomi. Kerangka kerja kelembagaan untuk kerjasama penelitian yang luas antara Rusia dan UE saat ini diatur oleh :

- *Agreement on Partnership and Cooperation* antara Rusia serta UE dan negara-negara snggotanya, yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 1994, berlaku sejak 1 Desember 1997;
- Kesepakatan kerjasama di bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara pemerintah Federasi Rusia dan Komunitas Eropa, ditandatangani pada tanggal 16 November 2000;
- Persetujuan antara Pemerintah Federasi Rusia dan Komunitas Energi Atom Eropa mengenai kerja sama di bidang keselamatan nuklir, ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2001;
- Persetujuan antara Pemerintah Federasi Rusia dan Komunitas Energi Atom Eropa mengenai kerja sama di bidang penelitian energi fusi terkendali, ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2001;
- *Road Map for a Russia-EU Common Space of Research and Education including Cultural Aspects*, yang dibentuk pada 10 Mei 2015.

Rusia dan Uni Eropa telah membentuk badan gabungan dan kelompok kerja untuk mengkoordinasikan kegiatannya dan mempertahankan pembangunan kemitraan penelitian berkelanjutan. Secara khusus, *Russia-EU Permanent Partnership Council on Research* yang pertama mengenai penelitian diadakan di Slovenia pada bulan Mei 2008. Mulai tahun 2006, kegiatan kelompok kerja gabungan tersebut mulai berjalan: *Russia-EU Permanent Working Group on Life Sciences and Health Research* (diadakan pada 2006); *Russia-EU Working Group on Biotechnologies and Agro-Food Research* (2006); *Russia-EU Working Group on Nanotechnologies and Materials* (2007); *Permanent Russia-EU Working Group on Civil Aeronautics Research* (2007); *Russia-EU Working Group on Energy Research* (2007) yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, kelistrikan dan biomassa. *Russia-EU Working Group on Nuclear Energy Research* (2007); *Russia-EU Working Group on Environmental Research* (2009); *Russia-EU Working Group on Information and Communication Technology Research* (2009)

Budaya

Pada tanggal 25 Oktober 2007, pertemuan pertama *Russia-EU Permanent Partnership Council (PPC)* tentang budaya diadakan di Lisbon. Para peserta menyoroti pentingnya kerjasama budaya yang lebih dekat dan sepakat untuk mempromosikan dialog antar budaya di semua dimensi, termasuk dalam hal religius. Pada tanggal 8 Desember 2009, Moskow menyelenggarakan sebuah seminar internasional «*Russia - EU: Signs on a Road Map of*

Cultural Cooperation». Seminar ini mengumpulkan lebih dari 150 peserta dari 22 negara Eropa dan 20 wilayah Rusia untuk membahas berbagai aspek kerjasama, format dan prospeknya. Para peserta juga mengajukan gagasan praktis spesifik untuk interaksi yang lebih lanjut. Rusia dan Uni Eropa telah menyelenggarakan berbagai acara di bidang musik (*“Europe through the Eyes of Russians, Russia through the Eyes of Europeans”*), bioskop (*“27+One” festival*), teater (*“Caravan of the World” festival*), arsitektur (*“Mosconstruct” project*).

Bentuk Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia

Aneksasi krimea oleh rusia pada tanggal 16 maret 2014 merupakan pemicu yang menyebabkan Uni Eropa memberikan enam ronde sanksi terhadap Rusia. Langkah UE ini sudah pasti telah dipikirkan secara matang oleh Putin sebelum melakukan aneksasi terhadap Krimea. Terbukti, Putin tidak mau melepaskan wilayah yang masih sangat terikat secara budaya dengan Rusia ini setelah serangan sanksi dari berbagai negara sekutu seperti Amerika dan Uni Eropa. Meski ada kemungkinan yang sangat jelas pada kerugian ekonomi yang besar terhadap Rusia, aneksasi ini jelas dapat memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eropa Timur. Sejak awal Maret 2014, UE melancarkan sejumlah sanksi diplomatik dan ekonomi melawan Rusia untuk memprotes keterlibatan Rusia dalam pelanggaran integritas wilayah kedaulatan Ukraina. Pengenaan sanksi adalah keputusan yang memiliki perspektif ganda di negara anggota UE. Banyak dari negara mereka yang memiliki hubungan dagang yang baik dengan Rusia dan oleh karena itu enggan melepaskan mitra dagang besar mereka. Pada dasarnya, negara-negara anggota UE terbagi dalam dua kelompok berdasarkan sikap mereka terhadap sanksi anti-Rusia. Kelompok pertama termasuk negara-negara seperti Denmark, Swedia, Inggris, Republik Ceko, Polandia, Estonia, Lituania dan Latvia. Negara-negara tersebut mendukung penerapan tindakan pembatasan keras, seperti sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan, untuk mengakhiri eskalasi konflik Ukraina-Rusia.

Menurut *Factsheet on EU Restrictive Measures*, sanksi Uni Eropa merupakan salah satu alat untuk mempromosikan tujuan *Common Foreign and Security Policy (CFSP)*: perdamaian, demokrasi dan penghormatan terhadap rule of law, hak asasi manusia dan hukum internasional. Sanksi tersebut telah diperkenalkan bukan hanya sebagai tindakan hukuman semata, namun sebagai bagian dari pendekatan politik komprehensif Uni Eropa yang bermaksud membawa perubahan politik ke negara sasaran, yaitu Rusia. Sanksi yang dibuat ini, berusaha untuk meminimalkan dampak merusak dari tindakan pembatasan tersebut terhadap penduduk Rusia dan berfokus pada individu dan entitas yang terlibat dalam konflik Rusia-Ukrainian (Shagnia, 2017).

Kelompok lain yang terdiri dari negara-negara seperti Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, Yunani, Siprus, Bulgaria, Malta, Hongaria, Luksemburg dan Austria menyukai pendekatan *“business as usual”* terhadap Rusia. Negara-negara ini memiliki berbagai niat untuk melawan kebijakan anti-Rusia yang ketat karena hubungan ekonomi mereka dengan Rusia, keengganan mereka untuk menanggung biaya ekonomi dari sanksi-sanksi yang tidak dapat dielakkan mengingat fakta bahwa tingkat saling ketergantungan perdagangan antara Uni Eropa dan Rusia sangat tinggi dan ketergantungan mereka pada sumber energi Rusia. Misalnya, Hungaria dan Bulgaria bergantung pada persediaan gas Rusia, pendekatan mereka bisa dijelaskan dengan keinginan untuk melindungi kepentingan nasional. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, mengatakan bahwa sanksi tersebut, pada kenyataannya, justru merugikan Barat daripada yang telah merugikan Rusia (newyorker.com)

Tindakan pembatasan yang diperkenalkan oleh Uni Eropa sehubungan dengan aneksasi ilegal

Krimea oleh Rusia dan destabilisasi yang disengaja terhadap negara tetangga yang berdaulat tersebut, mencakup berbagai hal berikut:

- Tindakan pembatasan terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam proses pengalihan Krimea ke Rusia dan tindakan Rusia di Ukraina Timur. Dua wilayah *Peoples's Republik*, Donetsk dan Luhansk, termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup larangan bepergian dan pembekuan aset luar negeri yang diterapkan secara total menjadi 150 orang dan 37 entitas, yang bertanggung jawab atas tindakan terhadap integritas teritorial Ukraina, orang-orang yang memberikan dukungan kepada pengambil keputusan Rusia dan 13 entitas di Krimea dan Sevastopol atau yang diuntungkan dari transfer kepemilikan yang bertentangan dengan hukum Ukraina.
- Tindakan diplomatik. Rusia dikeluarkan dari KTT G8 dan KTT G7 yang diadakan di Brussels yang harusnya diadakan di Sochi (wilayah Rusia) pada bulan Juni 2014. Juga negosiasi mengenai Rusia yang bergabung dengan *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)* dan Badan Energi Internasional ditangguhkan. KTT Uni Eropa-Rusia dibatalkan, dan anggota Uni Eropa memutuskan untuk berhenti mengadakan KTT bilateral secara reguler. Negosiasi bilateral Uni Eropa-Rusia mengenai visa dan mengenai perjanjian baru antara kedua belah pihak juga ditangguhkan.
- Pembatasan pada Krimea dan Sevastopol. Pembatasan ini termasuk penghentian hubungan ekonomi dengan wilayah yang disengketakan, karena Uni Eropa tidak menerima bahwa Krimea telah menjadi bagian dari Rusia. UE memasukkan larangan impor barang dari Krimea kecuali yang memiliki sertifikat Ukraina, sebuah larangan untuk berinvestasi di wilayah tersebut bagi perusahaan-perusahaan Eropa dan UE, termasuk kemungkinan untuk membeli real estate atau perusahaan di Krimea dan berinvestasi di sektor-sektor tertentu dalam ekonomi kawasan ini, larangan menyediakan layanan pariwisata di Krimea dan Sevastopol, larangan ekspor berkaitan dengan barang dan teknologi untuk sektor transportasi, telekomunikasi dan energi, serta eksplorasi sumber daya minyak, gas dan mineral, serta slarangan untuk memberikan bantuan teknis dari berbagai jenis di bidang-bidang yang disebutkan di atas.
- Langkah-langkah spesifik terhadap sektor yang ditargetkan (sanksi ekonomi). Langkah-langkah tersebut diberlakukan terhadap sektor ekonomi Rusia tertentu, di dalamnya termasuk sanksi keuangan yang melarang warga negara Eropa untuk membeli atau menjual obligasi baru, ekuitas atau instrumen keuangan sejenis lainnya yang berjangka waktu lebih dari 30 hari, yang dikeluarkan oleh lima bank milik negara besar Rusia (Sberbank, Vneshekonombank (VEB), VTB Bank, Gazprombank Dan Rosselkhozbank), tiga perusahaan energi besar Rusia (Rosneft, Gazprom Neft, Transneft), tiga perusahaan pertahanan besar Rusia (Oboronprom, United Aircraft Corporation dan Uralvagonzavod) (Oxenstierna, 2015): anak perusahaan dari perusahaan tersebut di luar UE, serta entitas lain yang bertindak dalam nama mereka atau pada arah mereka. Bantuan sehubungan dengan penerbitan instrumen keuangan oleh warga negara dan perusahaan Eropa dilarang, serta memberikan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 30 hari. Sanksi Eropa juga termasuk embargo senjata yang mencakup semua impor dan ekspor senjata dan bahan terkait, ditambah impor dan ekspor semua jenis barang *dual-use* yang masuk dalam daftar *dual-use goods* EU, serta peralatan sektor energi tertentu yang di ekspor ke Rusia terkait dengan eksplorasi dan produksi minyak di perairan lebih dalam dari 150 meter.
- Langkah-langkah mengenai kerjasama ekonomi. Implementasi program kerjasama bilateral dan regional EU-Rusia telah dihentikan sementara. Namun, proyek yang

menangani kerja sama lintas batas dan masyarakat sipil tetap tidak tersentuh.

Dampak sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas Krisis Ukraina

Berdasarkan sanksi asli yang telah ditetapkan oleh Rusia, termasuk di dalamnya tindakan pembatasan terhadap individu tertentu, sanksi tersebut tidak memiliki efek yang UE inginkan terjadi di Rusia yaitu adanya tekanan pada elit politik yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Rusia tersebut dan perubahan perilaku politik Rusia. Sanksi terhadap individu menyebabkan apa yang disebut *rally around the flag effect*. Alih-alih menggoyahkan dukungan publik untuk pemerintah, sanksi tersebut justru telah membantu pemerintah Rusia untuk memobilisasi dan memberi dukungan masyarakat kepada pemerintahan di Rusia (Wang, 2015). Sanksi tersebut telah mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme di kalangan orang Rusia, dan banyak individu di antara elit politik yang secara langsung ditargetkan oleh sanksi tersebut, menganggapnya sebagai tanda sah keberpihakan dan kontribusi mereka kepada Rusia atas krisis Krimea. Individu-individu yang telah menjadi target oleh pembekuan aset dan pembatasan perjalanan dalam sanksi tersebut, dengan bangga menyatakan eksistensi mereka dalam daftar UE sebagai tanda solidaritas patriotik mereka dengan tanah air dan kepemimpinan politik di Rusia" (Oxenstierna, 2015).

Menurut survei opini publik Levada Center, peringkat popularitas Presiden Rusia, Vladimir Putin, bangkit secara cepat sejak diberlakukannya sanksi rezim tersebut. Dukungan untuk presiden Rusia menunjukkan tren meningkat dengan angka tumbuh dari 63,5% di tahun 2013 menjadi 81,5% pada tahun 2014, dan 82% responden mendukung tindakan dan kebijakan Putin.

Pengenaan sanksi terhadap Rusia membuat sebagian besar penduduk Rusia percaya bahwa gagasan di balik tindakan sanksi pembatasan tersebut adalah untuk melemahkan ekonomi Rusia dan membuat negara tidak stabil. Survei opini publik Levada pada desember 2014, menunjukkan hasil bahwa hanya 12% responden yang mengaitkan sanksi Uni Eropa terhadap aneksasi Krimea, selebihnya percaya bahwa sanksi tersebut semata-mata karena sikap ketakutan akan perkembangan Rusia serta hanya ingin memberi tekanan pada Rusia.

Survei lain menunjukkan bahwa persatuan penduduk di Rusia juga telah berkembang secara drastis, persentase orang yang percaya bahwa Rusia adalah negara adidaya telah berkembang dari hanya 14% di bulan Maret 2014 sampai dengan 68% pada bulan November 2014 (Levada Center, 2014). Dengan fakta tersebut, dapat menjadi sebuah klaim bahwa sanksi (baik terhadap individu maupun ekonomi) telah gagal menciptakan tekanan bagi penduduk domestik di Rusia agar rezim tersebut perlu mengalami perubahan.

Menurut presiden Putin, dampak langsung pertama dari sanksi UE adalah *"the deterioration of bilateral trade and diplomatic relations between Russia and the EU"* (Business Insider, 2016). Untuk dapat memahami dampak ekonomi dari sanksi Uni Eropa terhadap Rusia serta mengapa negara tersebut rentan terhadap dampaknya, diperlukan sebuah gambaran singkat mengenai sistem ekonomi Rusia saat ini. Vladislav Inozemtsev, direktur *Center for Post-Industrial Studies* di Moskow memberikan definisi terhadap Rusia sebagai "negara yang tidak normal" (The Moscow Times, 2017). Inozemtsev menjelaskan bahwa semasa rezim Putin, minyak dan gas merupakan prioritas utama yang selalu dikembangkan, mengembalikannya kedalam kas negara dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat melalui biaya pensiun, gaji, dan investasi, alih-alih mengembangkan sektor manufaktur dan industri yang terus mengalami kemunduran semenjak jatuhnya Uni Soviet. Hal ini membuat Rusia menjadi ketergantungan terhadap sumber pendapatan minyak dan gas sebagaimana yang disebut oleh Senator Amerika, John Mc. Cain,

sebagai “sebuah pompa bensin yang menyamar menjadi sebuah negara”. Pernyataan Mc. Cain ini tentu saja ditentang oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa Rusia kini tidak sepenuhnya bergantung pada sektor minyak dan gas. Salah satunya adalah Hellevig, memberikan argumen bahwa Rusia telah beralih dari sektor minyak mentah ke ekspor produk olahan, dimana produksi makanannya meningkat dua kali lipat dari tahun 2000 sampai tahun 2013, dengan jumlah nilai ekspor makanan yang hampir 0 menjadi 16 miliar dolar. Selain itu, peraturan pajak, peradilan, administrasi publik serta peraturan perundangan hukum yang diluncurkan oleh Putin memberikan hasil yang sangat positif yaitu dengan menempati posisi puncak *Foreign Direct Investment* selama 2011 sampai 2013 serta PDB Rusia pada tahun 2012 sebanyak 2.015 miliar US Dollar, meningkat lebih dari 1000% dalam 12 tahun. Dengan argumen tersebut, kini sulit mengatakan bahwa Rusia hanya bergantung pada sektor minyak dan gasnya. Perekonomian Rusia mengalami penurunan sejak awal 2014. Pertama, PDB telah turun secara substansial. Sebelum kuartal pertama 2015 (ketika PDB turun 2,2%), ekonomi Rusia mengalami pertumbuhan 0,6% disaat adanya tekanan gabungan dari sanksi akibat aneksasi Krimea dan tekanan ekonomi global, kemudian berubah secara dramatis pada kuartal kedua tahun 2015 ketika PDB negara itu turun 4,6%. Secara keseluruhan, PDB Rusia pada 2015 secara total turun sebesar 3,9% (Tass Russia, 2017). Yang kedua, rubel Rusia turun dari 46 rubel ke Euro (RUB / EUR) di awal 2014 menjadi 85 RUB / EUR pada bulan Desember 2014, meskipun tetap stabil di kisaran 82 RUB / EUR pada bulan Januari 2016, namun akumulasi mata uang Rusia juga kehilangan hampir 50% nilainya terhadap dolar AS (CBC News, 2017). Devaluasi Rubel Rusia ini bukan hanya hasil dari sanksi keuangan yang dikeluarkan Uni Eropa, tapi juga oleh penurunan harga minyak yang sangat besar. Harga minyak Brent berada pada titik tertinggi pada akhir Juni 2014 di level 114,68 \$ AS per barel dan turun dalam waktu setengah tahun dengan harga sekitar 50 \$ AS per barel. Penurunan harga ini adalah dipicu oleh keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk tidak membatasi ekstraksi minyak mentah.

Ketiga, inflasi meningkat dengan cepat. Inflasi berada dalam satu digit selama tahun 2014, rata-rata 8% di semester kedua tahun itu, namun pada tahun 2015 meningkat menjadi 16%. Sejak itu turun menjadi di bawah 13% (12,9%) pada 2016 (Trading Economics, 2017). Keempat, arus investasi langsung asing ke Rusia mengimbangi FDI Rusia keluar pada 2014, namun pada Desember 2014 sempat menurun atau negatif, walau pada akhirnya kembali ke posisi positif pada kuartal pertama tahun 2015.

Inozemtsev pada artikel penelitian terbarunya, *“Putin’s self-destructing economy”*, menyatakan bahwa terdapat faktor signifikan yang dapat menjelaskan dampak nyata sanksi ekonomi terhadap Rusia. Ekonom tersebut mencatat bahwa tingkat *“real disposable income”* Rusia mengalami penurunan yang lebih parah daripada tahun 2005, tingkat *“retail sales rate”* yang mengalami penurunan menjadi setara dengan yang terjadi pada tahun 2009, serta tingkat *“federal budget income”* yang menurun ke tingkat yang setara pada tahun 2006. Terdapat dua penjelasan terhadap tren negatif ini, yaitu dampak dari sanksi dan dampak dari penurunan harga minyak. Kholodin dan Wittenberg berpendapat bahwa karena Rusia sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan minyak dan gas, maka menyusutnya harga minyak sangat bertanggung jawab atas kejatuhan ekonomi Rusia, bukan karena sanksi ekonomi (Kholodilin, 2015).

Pembatasan Eropa terhadap akses Rusia ke pasar keuangan internasional juga telah merusak kondisi kredit, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap investasi dan konsumsi di Rusia (Oxenstierna, 2015). Karena pembatasan keuangan mempengaruhi lima bank besar milik

negara di Rusia, konsekuensinya pasti berdampak negatif bagi ekonomi Rusia pada umumnya. Pada bulan Oktober 2014 lembaga pemeringkat kredit internasional Moody menurunkan peringkat *sovereign credit rating* dari Baal menjadi Baa2. Semua faktor tersebut secara langsung berdampak pada PDB suatu negara, terbukti pertumbuhan PDB Rusia sangat tidak signifikan, hampir sama dengan nol pada tahun 2014 ketika sanksi ekonomi diberlakukan, hanya 0,2% menurut perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF), 0,5% menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan 0 sesuai dengan *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD) (Wang, 2015).

Total impor makanan dan hewan hidup Rusia (SITC 0) pada tahun 2013 adalah sebesar 34.762,79 juta Euro (41.715,35 juta US \$), dari jumlah tersebut, 25% atau 8755,09 juta Euro dari semua makanan dan impor hewan hidup berasal dari Uni Eropa.¹⁶ Mengingat fakta bahwa seperempat impor makanan Rusia berasal dari Uni Eropa, sanksi impor sudah pasti memiliki efek pada pasokan bahan makanan Rusia. Indikator untuk melihat pengaruhnya yaitu dengan melihat inflasi harga pangan. Menurut *Trading Economics*, pada awal 2014 inflasi pada harga pangan sedikit di atas 5%. Dengan dimulainya konflik, inflasi meningkat dengan cepat menjadi hampir 10% dari bulan April sampai September 2014. Setelah diperkenalkannya sanksi impor, inflasi terus meningkat dari 16,4% di bulan Desember 2014 menjadi 22,8% pada bulan Januari 2015. Data ini memberikan sebuah pemahaman bahwa sebelum sanksi diberlakukan, harga pangan terus meningkat dan kemudian bertambah mahal dengan adanya sanksi Uni Eropa.

Sepanjang tahun 2014, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dasar beberapa kali untuk menstabilkan rubel Rusia. Dimulai dengan kenaikan awal menjadi 7,00% pada bulan Maret, tingkat suku bunga dasar Rusia meningkat dalam 4 langkah sampai Desember 2014 sampai tingkat 17,00% agar menjadikan Rusia lebih menarik dijadikan tempat investasi dan untuk menghentikan penarikan modal keluar. Selama tahun 2014 penarikan modal besar-besaran sangat menghancurkan ekonomi Rusia. Menurut data dari Bank Sentral Rusia, total *net outflows of capital* oleh sektor swasta adalah 151,5 miliar dolar AS, sebuah nilai yang bahkan melampaui penarikan modal selama krisis keuangan di tahun 2008 (133,6 miliar \$ US). *Net outflows of capital* dari Januari sampai September adalah 78,6 miliar dolar AS, dan pada kuartal terakhir tahun 2014, 72,9 miliar dolar AS yang tersisa meninggalkan negara tersebut. Langkah-langkah lain yang diambil oleh Bank Sentral Rusia untuk menstabilkan Rubel yaitu melakukan penjualan mata uang asing pada awal Desember 2014. Pada akhir Desember 2014, perusahaan milik negara seperti Gazprom dan Rosneft didorong untuk melakukan hal yang sama untuk lebih menstabilkan pasar. Perusahaan tersebut menjual dolar dengan harga sekitar satu miliar dolar AS per hari. Langkah-langkah ini tampaknya efektif setelah menstabilkan Rubel sekitar 75 RUB / EUR sejak pertengahan hingga akhir Desember 2014.

Upaya Rusia menghadapi sanksi Uni Eropa

Sejak sanksi UE terhadap Rusia diperkenalkan, Rusia melakukan tindakan balasan dengan memberikan *counter-sanction* terhadap UE dengan menetapkan embargo impor makanan dan produk pertanian. Pada tanggal 6 Agustus 2014, Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit yang melarang (atau membatasi), impor produk pertanian, bahan baku dan makanan yang berasal dari negara-negara yang telah memberlakukan sanksi terhadap entitas atau individu Rusia. Pada tanggal 7 Agustus 2014, pemerintah Rusia merilis daftar produk yang akan dilarang, yang mencakup berbagai produk dari beberapa kelompok: buah dan sayuran, susu dan daging.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Rusia tanggal 6 Agustus 2014 No. 56090 dan Resolusi Pemerintah Rusia 7 Agustus 2014 No. 77891 tersebut, Rusia memberlakukan larangan agribisnis untuk melindungi keamanan nasionalnya sesuai dengan Undang-undang Federal “*On special economic measures*”¹⁸ and “*On safety*” Pasal 1.2 Undang-undang Federal Rusia mengenai “*special economic measures*” menyatakan bahwa “langkah-langkah ekonomi utama diterapkan dalam kasus munculnya serangkaian keadaan yang memerlukan reaksi segera terhadap tindakan internasional yang ilegal atau tindakan tidak ramah negara asing atau badannya serta pejabatnya, memberikan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan Rusia dan (atau) melanggar hak dan kebebasan warganya, dan juga sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang- undang Federal yang sama menunjukkan bahwa tindakan ekonomi khusus tersebut dapat berbentuk seperti (1) penangguhan, keseluruhan atau sebagian, dari program kerjasama ekonomi, teknis, dan militer; (2) larangan atau pembatasan transaksi keuangan; (3) larangan atau pembatasan transaksi ekonomi internasional; (4) pencabutan atau penangguhan perjanjian perdagangan internasional; (5) modifikasi tarif ekspor atau impor; (6) larangan atau pembatasan akses ke pelabuhan Rusia dan wilayah udara Rusia; (7) pembatasan kegiatan pariwisata; dan (8) penghentian partisipasi Rusia dalam program dan proyek ilmiah dan teknologi internasional, dll (Newirth, 2016). Langkah-langkah ekonomi semacam itu bersifat sementara. Namun, durasinya ditentukan oleh Presiden Federasi Rusia.

Embargo makanan memiliki dampak yang cukup besar terhadap ekspor UE- Rusia. Sebelum adanya sanksi ini, ekspor makanan hasil pertanian dari Eropa ke Rusia sebanyak 11,864 juta euro atau sekitar 10% dari total ekspor UE ke seluruh dunia. (Dolidze, 2015). Selain embargo makanan, beberapa kali Rusia menolak pejabat UE untuk memasuki wilayah Rusia, dan pada bulan Mei, daftar “*blacklist*” Rusia yang termasuk di dalamnya terhadap 89 orang asal UE dirilis kepada pemerintah anggota UE (Euro News).

Larangan impor Rusia menunjukkan efek negatif pada bulan Juni dan Juli ketika sanksi tersebut dikeluarkan dan tetap stabil pada tingkat yang rendah sampai pada akhir 2014 sebagaimana tergambar lebih jelas pada tabel berikut :

The European Parliament's Policy Department for Economy and Scientific Policy menyimpulkan bahwa data terbatas yang tersedia untuk tahun 2014 tidak menunjukkan dampak besar akan hilangnya pekerjaan di sektor ini, namun kerusakan di wilayah dan sektor tertentu tetap mungkin cukup besar. Bank Dunia juga telah mengevaluasi dampaknya secara keseluruhan yaitu kecil, namun cukup substansial untuk beberapa sektor. Pada awal 2014 mengindikasikan bahwa kerugian sebesar US \$ 6,7 miliar karena embargo dapat menyebabkan kehilangan sebanyak 130.000 pekerjaan di sektor pertanian. Melihat pada keseluruhan dampaknya, pada bulan Agustus 2015 *The European Parliament's Policy Department for Economy and Scientific Policy* menilai bahwa di sebagian besar wilayah, sebagian besar sektor yang terkena dampak, telah menemukan pasar alternatif baik di dalam UE maupun di luar. Oleh karena itu, sektor pangan agribisnis UE dapat mengkompensasi kerugian di pasar Rusia karena sejak embargo diberlakukan, nilai ekspor Uni Eropa secara keseluruhan ke negara-negara ketiga meningkat sebesar 5,7%.

5. PENUTUP

Krisis Ukraina merupakan salah satu topik hangat dalam perbincangan dunia internasional. Pembatalan penandatanganan Association Agreement, yaitu sebuah tahapan integrasi Ukraina kedalam Uni Eropa, mengakibatkan gelombang protes besar-besaran dari warga Ukraina.

Perwakilan Uni Eropa yang menjadi penengah antara pemerintah Ukraina dan para pihak yang melakukan protes, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk melengserkan presiden Viktor Yanukovych.

Dilengserkannya Presiden Viktor Yanukovych yang disebut sebagai pro- Rusia, mengakibatkan kemarahan dari pihak Rusia, dengan alasan presiden terpilih pengganti Viktor Yanukovych merupakan pihak yang pro-Eropa. Setelah pemilihan, pasukan bersenjata tanpa identitas mengambil alih wilayah Krimea dan mengadakan referendum agar wilayah tersebut bergabung dengan Rusia. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini menyebabkan Uni Eropa memberi sanksi terhadap Rusia. Sanksi berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada Rusia, namun juga terhadap Eropa, karena pada dasarnya masing-masing pihak merupakan salah satu mitra dagang paling besar.

Sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia, akibat aneksasi Krimea oleh Rusia, menjadikan hubungan kedua negara berada pada titik terendahnya pasca perang dingin. Sanksi yang ditetapkan oleh Uni Eropa berdampak banyak pada perekonomian Rusia, diantaranya penurunan nilai mata uang Rusia terhadap US Dollar yang mencapai 50 persen. Namun, ada satu hal yang justru berdampak positif terhadap Rusia. Sejak ditetapkannya individu dan entitas yang mendapat sanksi dari Rusia, semangat cinta tanah air masyarakatnya justru meningkat, serta individu yang tercantum dalam sanksi tersebut merasa bahwa sanksi tersebut menjadi bukti bahwa mereka telah memiliki pengorbanan besar dan cinta terhadap Rusia. Dari pihak Uni Eropa, sanksi balasan yang ditetapkan oleh Rusia tidak berdampak yang signifikan terhadap ekonomi UE. Terbukti, setelah sanksi balasan Rusia ditetapkan, ekspor di negara anggota UE di sektor agrikultur tetap stabil karena masing-masing mampu mencari alternatif tujuan ekspor selain Rusia.

Pembatasan UE terhadap beberapa sektor masih menjadi perdebatan di negara-negara anggota UE, beberapa negara anggota UE yang merupakan eksportir terbesar ke Rusia menganggap bahwa sanksi ini sudah diluar tujuan utamanya yaitu mengubah politik Rusia di Ukraina. Sejak ditetapkan pada 2014, sanksi ini terus diperpanjang yang mengakibatkan dampak negatif bukan hanya bagi Rusia, namun juga bagi UE. Penulis berpendapat bahwa UE perlu melihat jenis sanksi apa yang masih relevan dengan kondisi saat ini, bukan hanya sekedar untuk menjatuhkan Rusia dari sisi ekonomi, mengingat beberapa negara anggota UE merupakan mitra dagang besar Rusia yang justru ikut berdampak negatif pada perekonomian mereka dari segi ekspor.

Sanksi balasan yang dikeluarkan oleh Rusia yaitu pelarangan impor di sektor agrikultur, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian di negara anggota UE. Hal ini justru menambah dampak di Rusia oleh karena naiknya harga bahan pangan karena kurangnya alternatif impor dari negara lain, mengingat selama ini sumber impor sektor agrikultur Rusia sebagian besar berasal dari UE. Penulis berpendapat bahwa pelarangan ini tidak relevan karena justru berdampak negatif bagi Rusia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA **BUKU**

Carlsnaes, Walter. "Foreign policy." Handbook of International Relations. 2002.

SAGE Publications. 28 Feb.2011

Coulumbis, Theodore A & Wolfe, James H, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan*

- Power*, penerbit : Putra A. Bardin, Bandung, 1999
- Dr. sutejo Amawasito, *Diktat Kuliah : teori Hubungan Internasional*, Universitas Jendral Ahmad Yani, Bandung, 2001.
- Dugis, Vinsensio (2007). "Analysing Foreign Policy", *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 20(2)
- Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.* (Jakarta: Suara Bebas, 2005)
- Goldstein, Joshua S., Jon C. Pevehouse., *International Relations: Tenth Edition, 2013-2014 Update*, (New Jersey : Pearson, 2014)
- Holsti, K.J., *International Politics: A Framework for Analysis, Sixth Edition.* (New Jersey : Prentice Hall, Inc, 1992)
- Jack C, Piano and Roy Otton. 1982, *The International Dictionary.* Third Edition. Penerjemah: Wawan Jiianda. England: Clio Press Ltd.
- James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy.* New York: The Free Press,
- James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction.* New York: The Free Press,
- Mochtar Mas'oed. 1990. *limit Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.* Jakarta:LP3ES.
- Sri Hayati dan Ahmad Yani., 2007, *Geografi Politik*, PT. Rafika Aditama: Bandung

JURNAL

- Fahrurudji, *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*, dalam Jurnal Glasnost Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok:Program Studi Rusia FIB UI, 2008), hal. 14-15. Mengacu pada A. Dugin, *Osnovy Geopolitiki: Geopoliticheskoe budushyee Rosii.* (Moskwa: Arktogea, 1997)
- Gearóid Ó, Tuathail , and Simon Dalby, 1998b, *Rethinking Geopolitics, Routledge 11 New Fetter Lane*, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada
- Juergen Baetz (8 November 2011). "Merkel, Medvedev inaugurate new gas pipeline". Associated Press. Diakses 29/7/2017
- Kholodilin, K., & Wittenberg, E. (2015). " The price of oil is having a stronger impact on the Ruble's exchange rate than are the sanctions": Seven questions to Konstantin Kholodilin. *DIW Economic Bulletin*, 5(44)
- Koszalin, Andreas Heinrich (5 February 2008). "Gazprom's Expansion Strategy in Europe and the Liberalization of EU Energy Markets" (PDF). *Russian Analytical Digest. Research Centre for East European Studies* (34 Russian Business Expansion). Diakses 29/7/2017
- Maria Shagina, *EU SANCTIONS POLICY TOWARDS POST-SOVIET CONFLICTS: CASES OF CRIMEA, EASTERN UKRAINE, SOUTH OSSETIA AND ABKHAZIA, Revista UNISCI / UNISCI Journal, No 43* (Enero/January 2017)
- Michael Emerson, EU-Russia Four Common Spaces and the Proliferation of the Fuzzy Journal. <https://www.ceps.eu/publications/eu-russia-four-common-spaces-and-proliferation-fuzzy>
- Neuwirth & Alexandr Svetlicinii (2016) *The current EU/US-Russia conflict over Ukraine and the WTO: a preliminary note on (trade) restrictive measures*, Post-Soviet Affairs, 32:3, 237-271, p. 245-246, DOI: 10.1080/1060586X.2015.1039330.
- Oxenstierna, Susanne & Olsson, Per, *The economic sanctions against Russia: impact and prospects of success*, Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2015,
- Tatia Dolidze, *EU Sanctions Policy towards Russia: The Sanctioner-Sanctionee's Game of*

Thrones, CEPS Working Document, No. 402 / January 2015. Source:
<https://www.ceps.eu>.

Wan Wang, Impact of Western Sanctions on Russia in the Ukraine Crisis, Journal of Politics and Law, Vol. 8, No. 2; 2015, p. 4, doi: 10.5539/jpl.v8n2p1.

Wicaksana, I.G.Wahyu (2007). "Epistemologi Politik Luar Negeri: 'A Guide to Theory'", *Global & Strategis*, 1(1);

WEBSITE

<http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rus/>. Diakses pada 26/7/2017

<http://www.awaragroup.com/upload/awara-study-russian-economy.pdf>. Diakses 21/7/2017

<http://www.bbc.com/news/av/world-europe-25328292/ukraine-crisis-catherine-ashton-welcomed-by-protesters>. Diakses Pada: 4/7/2016.

<http://www.businessinsider.com/vladimir-putin-interview-usrelationship-west-2016-1>

<http://www.dw.com/id/ukraina-tolak-perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003>.

Diakses Pada: 4/7/2016.

<http://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/russia>.

Diakses 29/7/2017

https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis_en. Diakses 21/7/2017

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-98-902_en.htm. Diakses Pada: 4/7/2016.

<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/>. Diakses 25/7/2017

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569020/EPRS_BRI\(2015\)569020_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569020/EPRS_BRI(2015)569020_EN.pdf). Diakses pada 26/7/2017

<http://gametheory101.com/courses/international-relations-101/rally-round-the-flag-effects/>. Diakses 1/8/2017

http://indonesian.irib.ir/international/eropa/item/75679-PM_Ukraina-Kami_akan_Gunakan_%5C. Diakses Pada: 4/7/2016.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78415/transport_connections_between_the_eu_and_russia.pdf?sequence=1. Diakses pada 21/7/2017

<http://www.newyorker.com/business/currency/hurt-putin-hurt>. Diakses 21/7/2017

<http://www.pompeicollege.in/pdf/ba-vth-sem/NATIONAL%20INTEREST.pdf>. Diakses 5/1/2017

<http://rsa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13523279.2011.544387?src=recsys&journalCode=fjcs20>. Diakses 25/7/2017

https://russiaeu.ru/userfiles/file/memorandum_on_early_warning_mechanism_2009_english.pdf. Diakses pada 26/7/2017

<https://www.rt.com/business/345957-russia-oil-major-exporter/>. Diakses pada 26/7/2017

https://sputniknews.com/tags/tag_NATO-RussiaCouncil/. Diakses 25/7/2017

<http://tass.ru/en/economy/850125>. Diakses 21/7/2017

<https://www.theguardian.com/world/2013/dec/01/ukraine-largest-street-protests-orange-revolution>. Diakses Pada: 4/7/2016

<http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/why-economic-growth-doesnt-matter-in-russia/502465.html>

www.youtube.com/watch?v=3Datd1V4670Wg&usq=AFQjCNGWtts864BXYpAF5Zbgwb0TqvQxoQ

Levada Center's "Approval of Governmental Bodies" survey. Source: <http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/>
Levada Center. (2014, December 11). *68% of Russian consider Russia as a great power.* Diakses dari <http://www.levada.ru/11-12-2014/68-rossiyan-schitayut-rossiyu-velikoi-derzhavoi>